

Daftar Pustaka

A. Buku

Afif Hasbullah, 2005 *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan.

Akhmad soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, 2016, Yogyakarta.

Awan Y Abdoellah, 2016 Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis kebijakan Publik*, Cetakan kesatu, Alfabeta, 2016, Bandung.

Baharudin Lopa, 1996, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Eko Riyadi, Enny Suprpto, 2012, *Vulnerable Groups :Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Eko Riyadi, dkk, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAMUII, Yogyakarta.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta

Puguh Windrawan, dkk, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan Kesatu, PUSHAMUII, Yogyakarta.

Rachmat dan Dadang Gunawan, 2016, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,

Cetakan satu, CV Pustaka Setia, Bandung.

Rhoda E. Howard, 2002, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ridwan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

R. Joni Bambang, 2013 *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
Sahya Anggara, 2012, *Ilmu Administrasi Negara*, Cetakan kedua, CV Pustaka Setia, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.

Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.

Sutjihati Somantri, 2012, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung.

Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Satu, Alfabeta, Bandung.

Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2016.

B. Jurnal atau Artikel Hukum

Purnomosid Arie. (2017) "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," Jurnal Refleksi Hukum 1 dalam Jurnal Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, 11(1), 131-150.

Solichin Abdul Wahab (1997) *Analisi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta dalam Jurnal Karim, M. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 86-102.

Solichin Abdul Wahab (1997) *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta dalam Jurnal Karim, M. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 86-102.

Yuliasti K. (2017) *Urgensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, hlm 160-171.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.